

ALASAN ITALIA MENGHENTIKAN EKSPOR SENJATA KE ARAB SAUDI

Irsan Fikri Ramadhani¹, Rendy Wirawan²✉

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2025-05-02 | Accepted 2025-04-26 | Published 2025-05-25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Italia terhadap pemerintah Arab Saudi, yaitu keputusan Italia untuk menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi. Dengan jenis penelitian eksplanatori, penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Neoliberalisme, dengan beberapa konsep yang berasal dari teori ini, seperti konsep hak asasi manusia dan konsep gerakan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam keputusan pemerintah Italia, terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan terkait dengan hak asasi manusia, konflik Yaman, dan juga gerakan masyarakat, yang pada akhirnya membuat Italia memutuskan untuk menghentikan ekspor mereka ke Arab Saudi.

Kata Kunci: Italia, Ekspor Senjata, Arab Saudi.

REASONS ITALY STOPPED ARMS EXPORTS TO SAUDI ARABIA

Abstract

This study aims to explain the background and a decision taken by the Italian government to the governments of Saudi Arabia, namely regarding Italy's decision to choose to stop the export of weapons to Saudi Arabia. With this type of explanatory research, this research uses secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The theory used is the theory of Neoliberalism, with several concepts derived from this theory, such as the concept of human rights and the concept of social movement. The results of this study show that in the Italian government's decision, there were many factors to consider related to human rights, the Yemen conflict, and also community movements, which in the end, made Italy decide to stop their exports to Saudi Arabia.

Keywords: Italy, Weapon Export, Saudi Arabia

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Irsan Fikri Ramadhani, Rendy Wirawan

1. PENDAHULUAN

Di dalam dunia Internasional, hubungan antar negara sudah biasa terjadi yang dimana hal ini ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antar kedua negara, dengan tujuan yaitu memajukan hubungan baik dalam bidang ekonomi, sosial, ataupun budaya sehingga hal inilah yang mendorong terciptanya kerjasama bilateral antar 2 negara. Dalam hal ini contohnya adalah Italia, yang dimana Italia sendiri merupakan negara yang cukup aktif dalam bidang ekonomi khususnya pada proses penjualan senjata, Italia merupakan salah satu anggota Uni Eropa yang menjadi pengekspor senjata terbesar selain daripada anggota Uni Eropa lainnya seperti Spanyol, Jerman, dan juga Prancis, Italia pula juga yang memiliki banyak hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan ekspor senjatanya, seperti contohnya, adalah Italia dengan Arab Saudi yang hubungan antara kedua negara ini telah terjalin dari 1932, yang dimana kerjasama itu dimanfaatkan Italia untuk memperkuat hubungan antar Italia dengan kedua negara tersebut baik secara ekonomi, politik, ataupun budaya. Italia sendiri sebagai salah satu produsen senjata sudah melakukan penjualan senjata dari tahun 1950, hingga sekarang (Trading Economics, 2022).

Italia sendiri, dalam kebijakannya menerapkan sistem Lisensi senjata, yang dimana sistem lisensi ini sendiri adalah cara negara Italia untuk mengatur penjualan senjata mereka kepada negara-negara lain, hal ini dikarenakan jumlah perusahaan penjualan senjata Italia yang cukup banyak dan sudah menjadi klien dengan beberapa negara diluar Italia, sehingga Italia menerapkan kebijakan lisensi sehingga dapat mengatur senjata apa saja yang boleh diperdagangkan ke negara tersebut khususnya kepada negara-negara Non Nato dan Uni Eropa.

Tabel 1. Data Penjualan Senjata Italia Ke Negara Arab Tahun 2010

Negara	Lisensi Senjata	Total Nilai Transaksi (Dalam Euro)	Kategori Senjata
Uni Emirat Arab	27	477Juta Euro (14,67%)	002,003,005,010,011,080,
Arab Saudi	91	432 Juta Euro (13,29%)	002,004,005,006,011,014, 080,
Oman	17	79 Juta Euro (3,92%)	002,010,011
Kuwait	18	33 Juta Euro (3,40%)	002,003,004,018,080
Pakistan	19	10 Juta Euro (4,67%)	003, 004, 005, 006, 009, 010, 011, 018, 021, 022, 080
Qatar	1	5 Juta Euro (5,95%)	011

Sumber: (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2010).

Keterangan:

001: Senjata kecil berkalibre kurang dari 20mm dan senjata semi otomatis dengan kalibre 12,7mm

002: Senjata dan Sistem senjata berkalibre lebih dari 12,7 MM

003: Amunisi Senjata

004: Bomb, Rudal, Missil, Torpedo

005: Peralatan alat Tembak

006: Kendaraan darat

007: Racun, Gas Air mata, Senjata Biologi, dan bahan radio aktif

008: Bahan Peledak dan bahan Bakar Militer

009: Kapal Perang

010: Pesawat tempur

011: Perangkat Elektronik

012: Sistem senjata dengan energi kinetic berkecepatan tinggi

013: Armor militer untuk perlindungan

014: Peralatan khusus untuk pelatihan dan sekenario militer

015: Perangkat untuk melihat gambar

016: Bahan senjata semi-selesai

017: Peralatan untuk perbaikan atau peningkatan senjata dan transportasi

018: Perlengkapan, dan Teknologi untuk produksi senjata
019: Sistem senjata energi,
020: Peralatan Kriogenic
021: Software Militer
022: Teknologi untuk pengembangan dan produksi senjata
080: Peralatan desain khusus untuk perbaikan senjata

Sesuai dengan data tabel diatas dapat dilihat, bahwa Italia sudah cukup aktif melakukan penjualan senjata ke negara-negara Arab, yang dimana penjualan-penjualan dari data diatas berhasil menghasilkan penjualan ke Italia sebesar lebih dari 500 Juta Euro, atau sekitar 20,36%, terbesar kedua setelah wilayah eropa, khususnya kepada Arab Saudi, PDB penjualan senjata Italia sekitar 13,29% dari Arab Saudi. Namun penjualan senjata Italia kepadanegara tersebut kembali mengalami kejadian fluktuatif dari kurun waktu 2011-2014. Namun walaupun jumlah penjualan pada 2011-2014 senjata cukup fluktuatif, dan tak kunjung stabil dalam penjualan lisensi ini, negara Arab Saudi tetap konsisten masuk di dalam negara tujuan ekspor Italia tepatnya di angka 15 besar negara tujuan ekspor senjata Italia, walaupun hanya di angka 15 besar negara tujuan ekspor senjata negara tersebut merupakan pangsa negara tujuan ekspor senjata terbesar di wilayah timur tengah (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2010).

Selanjutnya pada tahun 2015, sendiri penjualan senjata Italia mengalami sebuah peningkatan penjualan di negara-negara Arab, hal ini dikarenakan karna kemunculan sebuah konflik yaitu konflik Yaman, konflik ini cukup besar hingga menyebabkan sebuah isu kemanusiaan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Setelah diketahuinya adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Yaman, Hal inilah pada akhirnya membuat Uni Eropa untuk mengeluarkan resolusi Humanitarian situation in Yemen 2016 (European Parliament, 2016). Tentang pemberlakuan embargo senjata yang berkaca dari resolusi Uni Eropa, yaitu pasal 2008/944CFSP mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi resolusi pada tahun 2016 ini, masih banyak anggota Uni Eropa yang tidak melakukan embargo ini, hal ini disebabkan terkait dari jumlah pesanan senjata tempur dari Timur Tengah yang cukup besar. Italia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, dan merupakan negara yang memiliki pasal tentang militer dan hak asasi manusia, yaitu pasal 185/1990 (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Italy, 1990), pun tidak lepas dengan penjualan senjata kepada Arab Saudi, hal ini terbukti dari menurut data penjualan lisensi senjata yang cukup signifikan dari periode 2015-2019, terbukti dari data tersebut total ekspor senjata Italia mencapai 855,3 juta Euro selama periode tersebut. (Rete Italiana Pace E Disarmo, 2020).

Setelah adanya kejadian konflik Yaman, yang dimana hingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh Arab Saudi, Arab Saudi kembali melakukan pelanggaran HAM lainnya, yaitu adanya pembunuhan jurnalis Arab bernama, Jamal Khashoggi yang dimana mengundang banyak perhatian negara-negara, ada beberapa negara yang turut berduka cita terhadap kejadian pembunuhan jurnalis tersebut seperti Indonesia (AP, 2018), lalu ada Spanyol dan juga Jepang Denmark, Finlandia, dan juga Jerman yang langsung menanggukuhkan ekspor mereka ke Arab Saudi, dan ada pula negara seperti Turki dan Amerika yang mendorong penyelidikan terhadap jurnalis tersebut (DAWN, 2018).

Setelah menerima beberapa kritik dari masyarakat, Italia pun merespon resolusi dari Uni Eropa pada bulan juni 2019, yang dimana Italia merespon resolusi ini, pada awalnya dengan cara mengikuti negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, yaitu dengan melakukan embargo senjata sementara terhadap Arab Saudi, yang dimana embargo senjata ini diberlakukan oleh Italia selama 18 bulan, kepada negara tersebut, dan pula pemberlakuan oleh Italia ini diberlakukan hampir ke semua senjata-senjata pemusnah masal, seperti Misil, Bom udara berjenis MK82, MK84 dan Jet tempur berjenis F-35, dan juga ada pula senjata-senjata kaliber (Ullah, 2021). Namun keputusan embargo ini pun kembali diubah pada tahun 2021, menjadi permanen oleh pemerintah Italia, yang dimana pemberhentian ini termasuk dengan perjanjian yang pernah disepakati pada tahun 2016, yang

dimana mencangkup 20.000 misil tempur atau setara dengan 485 juta euro, antara Italia dengan Arab Saudi (AlJazeera, 2021).

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Serta metode untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan dan mengorganisir data- data yang diperoleh lalu dihubungkan dengan latar belakang penelitian yang kemudian menghubungkan data tersebut dengan data-data yang lain untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban pada rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Italia Menghentikan Ekspor Senjata ke Arab Saudi

Penghentian ekspor senjata permanen adalah keputusan Italia untuk menghentikan ekspor senjata mereka ke Arab Saudi, keputusan ini sendiri diumumkan oleh menteri luar negeri Italia yaitu Luigi Di Maio, pada tanggal 29 Januari 2021, yang pada akhirnya keputusan ini sendiri merupakan hasil dari tindak lanjutan keputusan Italia yang memutuskan menerapkan embargo selama 18 bulan kepada Arab Saudi tersebut, pada Bab ini pula, Peneliti akan menguraikan tentang Konflik Yaman, ekspor senjata Italia kepada negara-negara arab, dan beserta faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan Italia untuk memutuskan penghentian ekspor senjata kepada Arab Saudi setelah embargo 18 bulan berakhir.

Konflik Yaman

Konflik Yaman, konflik ini sendiri, cukup besar hingga menyebabkan isu kemanusiaan, konflik ini melibatkan pemerintah Yaman dan beberapa kelompok-kelompok separatis salah satunya adalah kelompok Houthi, yang merupakan salah satu kelompok gerakan Islam politik-bersenjata. Tidak hanya itu, di konflik ini muncul juga beberapa kelompok-kelompok separatis lainnya, yang terlibat yaitu seperti Al-Qaeda di Semenanjung Arab (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula atau disingkat "AQAP") dan Negara Islam Irak dan Levant (Islamic State of Iraq and Levant atau disingkat "ISIL"). Selain itu ada pula, negara seperti Iran yang mendukung pasokan senjata untuk kelompok-kelompok separatis, dan muncul pula intervensi-intervensi militer dari Arab Saudi, dan juga koalisi arab atau Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council atau yang disingkat "GCC") di dalam konflik in (AlJazeera, 2021). Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council atau yang disingkat "GCC") sendiri beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Kuwait, dan juga Bahrain. GCC dalam konflik ini selain melakukan intervensi militer GCC juga memberikan sumbangan ekonomi sebesar 8 juta dollar Amerika untuk biaya pemulihan ngerara (Bennet, 2013). lalu selama konflik ini sendiri terjadi sekitar 80 orang menjadi korban termasuk 3 anak-anak dan 156 korban cedera (Human Rights Watch, 2022). Selama konflik terjadi, menurut data jumlah korban yang disebabkan oleh serangan darat maupun udara, dari Arab Saudi dan Koalisinya mencapai sekitar 17.062 korban dengan 6.592 tewas dan 10.470 terluka (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1998). Selain itu masyarakat sipil juga sangat dirugikan, karena adanya pembatasan yang sewenang-wenangnya dari tentara koalisi Arab, terhadap bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh PBB, (Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat "PBB") dengan alasan mencegah adanya senjata yang dikirimkan oleh negara-negara yang mendukung kelompok-kelompok separatis (Cumming-Bruce, 2018). Kejadian lain selama melakukan intervensi ialah, dalam hasil laporan dari HRW(*Human Rights Watch*), ditemukan pula bahwa pasukan Arab Saudi di Yaman melakukan penyiksaan, penghilangan paksa, dan penahanan sewenang-wenangnya, yang dimana menurut laporan NGO tersebut ada 16 kasus ada penahanan tanpa proses, dan 5 kasus yang "dihilangkan secara paksa", dan menurut HRW pula kejadian perang Yaman ini dapat mendorong Yaman ke ambang kelaparan (Okezone, 2020). Oleh karena itu, PBB menyatakan bahwa Arab Saudi dan Koalisinya bersalah pada konflik Yaman (Keaten, 2018).

Sehingga setelah Uni Eropa Mengetahui adanya isu kemanusiaan yang dilakukan oleh Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) di Yaman, setelah mengkuhtip pernyataan dari PBB melalui data UNHCR, bahwa Arab Saudi dan Koalisinya bersalah atas aksi militer mereka yang membunuh banyak rakyat sipil di Yaman.

Aksi Uni Eropa dalam Isu Kemanusiaan

Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional adalah yang dimana sangat berfokus kepada isu-isu kemanusiaan di dunia, hal ini dikarenakan adanya kejadian historis di masa lalu seperti kejadian setelah perang dunia ke 2, yang telah menyebabkan korban hingga 70 Juta korban jiwa di Eropa, sehingga hal inilah yang menyebabkan masyarakat Eropa khususnya negara-negara Eropa sadar terhadap pentingnya paham kemanusiaan dan juga perdamaian.

Setelah terbentuknya Uni Eropa, negara anggotanya akan terikat kepada norma bersama yang berlaku dan telah disepakati yang ada di Uni Eropa. Dalam hal ini adalah norma Uni Eropa yang mempunyai 6 prinsip norma yang harus ditaati yaitu: kebebasan, demokrasi, kesetaraan gender, hukum (*Rule of Law*), Hak Asasi Manusia, dan juga menyebarkan perdamaian. Selain dari prinsip norma ada pula 15 tujuan, yang ingin dicapai dari norma Uni Eropa, yang akan bermanfaat baik untuk anggota-anggotanya maupun ke seluruh masyarakat internasional itu sendiri, dengan yang juga mengedepankan 6 prinsip norma Uni Eropa, berikut 15 tujuan dari norma Uni Eropa yaitu:

Menyebarkan perdamaian, dan nilai-nilai kesejahteraan kepada masyarakatnya

Menawarkan kebebasan, keamanan dan keadilan tanpa batas internal, sementara juga mengambil tindakan yang tepat di perbatasan eksternal untuk mengatur suaka dan imigrasi dan mencegah dan memerangi kejahatan

Membangun pasar bebas

Pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan stabilitas harga yang kompetitif, dan kemajuan sosial

Melindungi dan menjaga lingkungan

Menyebarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Melawan diskriminasi antar masyarakat

Menyebarkan keadilan sosial, kesetaraan gender dan melindungi hak asasi anak

Meningkatkan ekonomi, sosial antar teritorial dan menjaga solidaritas antar anggota Uni Eropa

Menghormati keragaman budaya antar masyarakat

Membentuk dan menjaga kestabilan nilai mata uang moneter Euro Uni Eropa

Di atas adalah tujuan yang ingin dicapai dari prinsip Uni Eropa antar anggota-anggotanya, sedangkan tujuan Uni Eropa untuk masyarakat internasional adalah seperti berikut:

Menjunjung tinggi dan mempromosikan nilai-nilai dan kepentingannya berkontribusi pada perdamaian dan keamanan serta pembangunan berkelanjutan di negara-negara global berkontribusi pada solidaritas dan saling menghormati di antara orang-orang, perdagangan bebas dan adil, pengentasan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia ketaatan yang ketat terhadap hukum internasional

Dari beberapa tujuan diatas, dapat dilihat bahwa organisasi Uni Eropa tidak hanya mengedepankan kepentingan bersama untuk anggota-anggotanya saja seperti contohnya menjaga perdamaian dan pasar bebas, namun melainkan pula, Uni Eropa juga berfokus pada penyebaran prinsip mereka agar dapat tersebar ke seluruh dunia, baik dalam hal perdamaian ataupun untuk bergerak mengatasi isu-isu kemanusiaan di negara yang sedang mengalami isu kemanusiaan.

Kepentingan Uni Eropa dalam menjaga perdamaian dan menaati Hak Asasi Manusia (HAM) telah terkandung ke pasal Uni Eropa yaitu pasal *Council Common Position* 2008/944/CFSP kriteria ke 2 yaitu menghormati Hak Asasi Manusia ke negara tujuan ekspor yang pasalnya dikutip sebagai berikut (European Union, 2019).

“Kriteria 2: Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di negara tujuan akhir seperti negara tersebut 1menghormati aturan hukum humaniter setelah menilai sikap negara penerima dalam penerapan Hak Asasi Manusia, negara anggota wajib:

Menolak izin ekspor, jika ada resiko bahwa teknologi atau peralatan militer yang akan dieskpor dapat digunakan untuk represi internal

Bersikap hati-hati dan waspada dalam memberikan lisensi, dengan mempertimbangkan kasus-kasus dan dengan mempertimbangkan teknologi dan peralatan militer yang akan dikirim kepada negara yang dimana terjadi isu kemanusiaan yang serius dan telah ditetapkan oleh PBB atau Dewan parlemen Eropa.”

Dalam melakukan peranannya Uni Eropa, sendiri lebih sering berfokus dan menekankan kepada soft power dengan penerapan penggunaan sanksi, dan juga dialog politik, dan untuk instrumen tindakan militer adalah salah satu cara terakhir dalam prinsipnya, dan harus sesuai dengan piagam PBB (Albrecht, 2004).

Italia sebagai salah satu anggota Uni Eropa, dinilai pula cukup aktif dan banyak terlibat dalam banyak kasus konflik yang menyebabkan isu-isu kemanusiaan, tidak hanya pada isu konflik Yaman yang peneliti teliti dengan melibatkan Arab Saudi, melainkan Uni Eropa juga cukup sering terlibat diberbagai kasus konflik sebelum isu kasus kemanusiaan di Yaman, walaupun tidak mengintervensi secara langsung namun Uni Eropa, tetap melakukan intervensi melalui sanksi-sanksi yang akan ditujukan kepada negara-negara terkait, oleh karna itu dibawah ini peneliti memberikan 3 contoh kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Uni Eropa ataupun Italia sebagai salah satu aktor selain daripada konflik Yaman seperti berikut.

Konflik Libya yang beberapa negara besar pun melakukan embargo terkait masalah HAM ini seperti contohnya Jerman, Prancis, dan juga Italia yang langsung menerapkan embargo agar masalah imigran dan juga HAM dapat terselesaikan (Golden, 2011).

Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar, yang berkaitan dengan adanya Junta Militer dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya Italia sendiri dalam kasus Junta Militer juga melakukan penerapan embargo selain itu pada kasus permasalahan rohingya, sendiri cukup aktif bersama dengan beberapa negara lainnya dalam mengatasi krisis etnis rohingya, dengan cara menerima para pengungsi dan juga memberikan bantuan dana kepada etnis tersebut (UNHCR, 2022).

Kasus Konflik Suriah, konflik yang masih berjalan hingga saat ini berdampak pada negara yang berkonflik melainkan pula kepada masyarakat suriah secara tidak langsung, yang dimana masyarakat suriah harus mengungsi ke negara-negara tetangga termasuk ke negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk dengan Italia, yang dimana Italia juga sebagai salah satu negara yang memberikan suaka harus menerima pengungsi ke negaranya, karna hal ini jumlah pengungsi yang terus bertambah setiap tahunnya, namun permasalahan ini dapat diatasi oleh pemerintah Italia dengan melakukan kerjasama dengan anggota Uni Eropa lainnya seperti Jerman dan juga Swedia, dalam hal mendistribusikan para pengungsi ke negara tersebut, sehingga dalam hal ini Italia mampu permasalahan penghormatan kepada konvensi HAM, dan Italia sendiri konsisten dalam penegakan masalah HAM

Dari beberapa contoh konflik diatas, dapat ditemukan bahwa Uni Eropa dan khususnya Italia mempunyai peran penting dalam menerapkan kebebasan Hak Asasi Manusia di dunia internasional yang mereka anut, dengan memanfaatkan soft power dengan menggunakan sanksi sebagai upaya mengatasi isu-isu kemanusiaan yang ada di dunia internasional sehingga dapat diketahui bahwa Uni Eropa merupakan aktor penting dalam dunia Internasional.

Perkembangan Ekspor senjata Italia kepada negara Arab Saudi

Selama konflik Yaman berlangsung, penjualan senjata Italia kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2015-2019, yang dapat dilihat pada data sebagai berikut yang dimana pula membuat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masuk ke peringkat 11 dan 12 negara tujuan ekspor senjata Italia. (disarmo, 2020).

Tabel 2. data Penjualan senjata Italia tahun 2015-2019 kepada Arab Saudi

Tahun	Total Ekspor	Lisensi	Type Senjata
2015	257,2 Juta Euro	36	001,003,004,005,008,010,011,014,016,
2016	427,5 Juta Euro	15	004,005,008,010,011,014,022,
2017	51,9 Juta Euro	12	001,004,005,006,010,011,022,
2018	13,4 Juta Euro	11	001, 005,011,015,017,022
2019	105,4 Juta Euro	10	001,003,004,005,006,010,011,

Sumber: (disarmo, 2020).

Keterangan:

001: Senjata kecil berkalibre kurang dari 20mm dan senjata semi otomatis dengan kalibre 12,7mm

002: Senjata dan Sistem senjata berkalibre lebih dari 12,7 MM

003: Amunisi Senjata

004: Bomb, Rudal, Missil, Torpedo

005: Peralatan alat Tembak

006: Kendaraan darat

007: Racun, Gas Air mata, Senjata Biologi, dan bahan radio aktif

008: Bahan Peledak dan bahan Bakar Militer

009: Kapal Perang

010: Pesawat tempur

011: Perangkat Elektronik

012: Sistem senjata dengan energi kinetic berkecepatan tinggi

013: Armor militer untuk perlindungan

014: Peralatan khusus untuk pelatihan dan sekenario militer

015: Perangkat untuk melihat gambar

016: Bahan senjata semi-selesai

017: Peralatan untuk perbaikan atau peningkatan senjata dan transportasi

018: Perlengkapan, dan Teknologi untuk produksi senjata

019: Sistem senjata energi,

020: Peralatan Kriogenic

021: Software Militer

022: Teknologi untuk pengembangan dan produksi senjata

080: Peralatan desain khusus untuk perbaikan senjata

Dari hasil penjualan senjata diatas, menurut data dari Sipri, Italia pada periode 2015-2019 membuat Italia masuk ke 10 besar, negara pengekspor senjata didunia dengan total pangsa ekspor senjata sebesar 2,1% selama periode tersebut (Wezeman, 2019).

Lalu selama konflik Yaman ini pula, penjualan senjata merupakan salah satu sumber yang cukup memberi dampak ekonomi bagi Italia, hal ini terbukti dalam kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2015-2017, terus mengalami peningkatan dimulai pada tahun 2015 dengan mencapai total pendapatan sebesar 8,2 Juta Euro, lalu pada tahun 2016 mencapai, 14,9 Juta Euro, dan kemudian pada tahun 2017 mencapai 10,3 Juta Euro, dan jumlah pendapatan penjualan senjata bagi Italia ini terus bertambah 17% selama konflik Yaman terjadi (Rete Italiana Pace E Disarmo, 2021).

Isu HAM Sebagai Nilai yang dianut Italia

Konsep dari konsep HAM yang dimana Italia sebagai salah satu pendiri Uni Eropa menganut salah satu pasal dari Uni Eropa yang menggambarkan tentang kemanusiaan yaitu pasal tentang menghormati Hak Asasi Manusia, Pemerintah Italia sendiri mengimplementasikan hal ini ke pasal

mereka yaitu pasal hukum Nomor 185/1990, yang berisi tentang menghormati Hak Asasi Manusia di negara tujuan ekspor (Ministero degli Affari Esteri, 1990).

Pasal 185/1990 ini, sendiri sudah menjadi acuan Italia dalam pengaturan ekspor dan impor senjata-senjata mereka ke negara-negara luar dan dalam pasal ini pula, Italia telah menyesuaikan aturan 185/1990 ini, sesuai dengan aturan Uni Eropa yaitu embargo senjata dan juga pembekuan aset jika negara yang dituju ekspor senjatanya, melakukan Isu kemanusiaan, yang mana hal ini merupakan salah satu faktor dari konsep Hak Asasi Manusia (Carpagnano, 2020). Pasal ini pula digunakan Italia untuk membatasi dan juga mengawasi perusahaan-perusahaan produksi senjata Italia yang dimana bermitra dengan berbagai negara di dunia dalam hal ini ada di Italia dan pelanggaran di Yaman menjadi salah satu faktornya.

Gerakan Politik dari LSM

Adapun faktor lain, yang menggambarkan bagaimana proses dari teori Neoliberalisme yang dimana konsep yang berlaku pada penelitian ini yaitu dari *Social Movement* atau gerakan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Italia, yang dimana masyarakat yang aktif dalam proses politik yang berjalan di Italia maupun dunia Internasional dengan melakukan salah satunya adalah kampanye.

Dalam hal ini masyarakat Italia, melakukan kampanye untuk meminta penghentian ekspor senjata secara permanen. Dari hasilnya sendiri, LSM ini dibantu dengan beberapa LSM lainnya seperti Mwatana LSM dari Yaman dan ECCHR (European Center for Constitutional and Human Right), Amnesty Internasional dari Prancis, Campaign Against Arms Trade dari Inggris, dan juga Centre Delas dari Spanyol, mampu menemukan hasil bahwa ada senjata Italia yang sedang dipakai untuk membunuh masyarakat sipil di konflik Yaman, sehingga LSM ini mampu membawa permasalahan ini kantor kejaksaan Italia, dan mendorong juga ICC (International Criminal Court atau disingkat "ICC"), untuk menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terlibat di penjualan senjata ke Yaman pada Desember 2019, selain itu pula hasil ini juga menjadi salah satu faktor pendorong dan sekaligus bukti yang membuat Pemerintah Italia untuk memutuskan menghentikan ekspor senjatanya ke Arab Saudi (European Centre For Constitutional and Human Rights, 2019).

Selain memiliki peran penting di konflik Yaman ini, LSM ini juga pernah berhasil membuat parlemen Italia memikirkan ulang penerapan kebijakan Nuklir sharing Nato, sehingga pemerintah Italia lebih mempertimbangkan untuk meratifikasi Perjanjian Pelarangan senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of nuclear weapons atau disingkat "TPNW" Treaty), yang mana kampanye ini bernama "Italia, ripensaci" dan terlaksana pada 2017, berkerjasama dengan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon), kampanye ini sendiri berhasil meraih nobel perdamaian 2017 (Rete Italiana Pace e Disarmo, 2020). Lalu LSM ini pula pernah berhasil melakukan kampanye No- F35 yang pada akhirnya membuat pemerintah Italia menghentikan pembelian pesawat berjenis F35 (RT News, 2018).

Pelanggaran Arab Saudi dalam penerapan HAM

Dalam kebijakannya Arab Saudi negara tersebut, juga dapat diketahui bahwa kurang tegas menaati aturan yang ada di PBB, hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan-aturan yang dinilai tidak sesuai dengan HAM seperti, kebebasan dalam berpendapat, demokrasi, aturan untuk masyarakat warga negara asing maupun imigran yang bertempat tinggal dan yang bekerja di negara tersebut.

Dalam hal ini, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kasus-kasus yang ditemukan oleh *Amnesty International* ataupun *Human Rights Watch* (HRW) dari Arab Saudi, baik secara internal ataupun eksternal dari negara tersebut.

Contoh kasus-kasus yang terjadi secara internal di dalam negara tersebut adalah seperti diskriminasi kepada perempuan, penyiksaan kepada buruh imigran, adanya aturan bahwa wanita tidak boleh menyetir tanpa izin dari wali laki-laki, tidak adanya kesetaraan gender ataupun menghargai hak-hak LGBT, dan masih adanya penangkapan sewenang-wenangnya, dan juga masih

kurangnya kebebasan berpendapat (Deutsche Welle, 2013). Hal ini didorong pula dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan HAM seperti eksekusi mati bagi masyarakat yang melanggar aturan (Deutsche Welle, 2013).

Selain itu faktor lain sebagai konsep HAM, setelah kejadian pembunuhan jurnalis Arab yang menjadi faktor pendorong Italia melakukan embargo sementara, walaupun setelah terjadinya embargo sementara, ternyata kejadian-kejadian pelanggaran HAM masih sering terjadi seperti pada tahun 2019, Arab Saudi telah melakukan banyak pelanggaran baik itu melakukan pembunuhan kepada imigran-imigran Ethiopia, lalu ada juga pemberlakuan perbedaan gaji buruh imigran antara kaum pria dan wanita lalu kemudian, kebijakan eksekusi mati yang telah membunuh masyarakat sebanyak 185 kali di tahun 2019, hal ini termasuk dengan adanya penangkapan dan eksekusi mati terhadap 3 aktivis Shia dan juga pembunuhan 11 aktivis perempuan, lalu ada pula 10 anak di bawah umur yang diberi hukuman mati.

Lalu menurut LSM yang bergerak dalam HAM di Arab Saudi, banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi di dalam penjara yang ada di Arab Saudi, salah satu contohnya adalah di penjara al- Ha'ir yaitu penjara yang ada di Riyadh, terbukti bahwa menurut laporan LSM ALQST, para tahanan mengalami siksaan fisik, dan dipenjara tersebut pula, para tahanan juga kekurangan perawatan medis dan juga kekurangan sanitasi (United State Department of state, 2020)

4. KESIMPULAN

Penjualan senjata pada dasarnya merupakan salah satu cara negara untuk meningkatkan ekonominya, salah satu contoh negaranya adalah Italia sebagai salah satu negara yang pernah menjadi aktor di perang dunia, Italia tidak lepas dengan penjualan-penjualan senjatanya ke berbagai negara, sebagai salah satu pendiri dan juga anggota dari Uni Eropa, Italia sendiri sudah seharusnya menyetujui norma dan prinsip bersama Uni Eropa, yang dimana merupakan aturan atau norma bersama yang harus ditaati oleh anggota Uni Eropa dan pembuatnya, dalam hal ini ada salah satu pasal Uni Eropa yang juga menjadi pasal dari Italia yaitu pasal 185/1990 Italia yang juga mencerminkan pasal 2008/944 CFSP Uni Eropa, yaitu tentang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tujuan ekspor senjata.

Oleh karna itu, Italia sebagai aktor negara penjual senjata yang juga menjual senjatanya ke Arab Saudi, memutuskan memilih untuk melakukan penghentian secara permanen ekspor senjata mereka setelah diketahuinya adanya pelanggaran HAM yang dilakukan Arab Saudi, seperti adanya penggunaan senjata Italia yang dipakai untuk membunuh masyarakat sipil yang ada di Yaman, dan hal ini juga dipengaruhi pula dengan beberapa faktor lain seperti pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Arab Saudi, baik secara internal negara maupun eksternal yang cukup besar dan dipengaruhi juga dengan adanya aktivis-aktivis/LSM dari Italia, yang menyuarakan penghentian ekspor dengan cara melakukan kampanye dan memberikan banyak bukti pelanggaran HAM, yang membuat Italia memutuskan untuk melakukan penghentian secara permanen ekspor senjata mereka ke Arab Saudi, sebagai tanda pesan untuk perdamaian, Italia sendiri melakukan penghentian secara permanen kepada berbagai senjata termasuk mempermanenkan senjata-senjata pemusnah massal seperti rudal, roket, torpedo, dan senjata lainnya.

Hal ini dapat menjadikan Italia sebagai contoh bagi anggota-anggota Uni Eropa lainnya, untuk lebih sadar mematuhi dan mengedepankan tujuan dari norma yang telah disetujui bersama sebagai anggota Uni Eropa yaitu prinsip perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Ulrich et al., "A Human Security Doctrine for Europe". 7-35 Barcelona: Caixa Catalunya Obra Social, 2004
- Al-Jazeera, "Italy permanently halts arms sales to Saudi Arabia, UAE" 29 Januari 2021, www.aljazeera.com/news/2021/1/29/italy-makes-permanent-arms-sale-freeze-to-saudi-arabia
- Bruce, Nick Cumming. "War Crimes Report on Yemen Accuses Saudi Arabia and U.A.E." The New York Times, 28 Agustus 2018, <https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/middleeast/un-yemen-war-crimes.html>
- DAWN Democracy for the Arab World Now, "International Reaction" 22 Mei 2018, <https://dawnmena.org/founder/international-reaction/>
- Deutsche Welle Indonesia, "Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat" 21 Oktober 2013, <https://www.dw.com/id/pelanggaran-ham-di-arab-saudi-meningkat/a-17171906>
- Disarmo, "30° Anniversario della legge 185/90" 9 July 2020, <https://www.disarmo.org/rete/docs/5346.pdf>
- European Center for Constitutional and Human Rights. "Italian arms exports to Yemen: State and corporate responsibility". 27 Oktober 2020, <https://www.ecchr.eu/en/event/italian-arms-exports-to-yemen-state-and-corporate-responsibility/>
- European Parliament. *humanitarian situation in Yemen*. No. 2016/2515(RSP). Brussels, 2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0066_EN.html?redirect
- European Union. *Council Common Position*. No. 2008/944/CFSP. Brussels, 2008. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EN:PDF>
- Golden, Rabia. "Italy reiterates the necessity to ban arms from entering Libya by land, air and sea." The Libya Observer, 22 Februari 2020, <https://libyaobserver.ly/inbrief/italy-reiterates-necessity-ban-arms-entering-libya-land-air-and-sea>
- Human Rights Watch. "Yemen: Latest Round of Saudi-UAE-Led Attacks Targets Civilians". 2 Januari 2022, [https://www.hrw.org/news/2022/04/18/yemen-latest-round-saudi-uae-led-attacks-targets-civilians#:~:text=\(Sanaa\)%20%E2%80%93%20The%20Saudi%20and, and%20Human%20Rights%20Watch%20said](https://www.hrw.org/news/2022/04/18/yemen-latest-round-saudi-uae-led-attacks-targets-civilians#:~:text=(Sanaa)%20%E2%80%93%20The%20Saudi%20and, and%20Human%20Rights%20Watch%20said)
- Keaten, Jamey. "Saudi Arabia, UAE may be guilty of war crimes in Yemen: UN experts" 28 Agustus 2018, Global News, <https://globalnews.ca/news/4413561/uae-saudi-arabia-may-committed-war-crimes-yemen/>
- Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Italy. Law No. 185 of 9 July 1990. Italy, 1990. https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/legge_09_07_1990_n185.pdf
- Oke Zone News, "HRW: Pasukan Arab Saudi Lakukan Pelanggaran HAM Berat di Yaman" 26 Maret 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/03/26/18/2189296/hrw-pasukan-arab-saudi-lakukan-pelanggaran-ham-berat-di-yaman>
- Rete Italiana Pace E Disarmo. "A tre anni dal voto ONU sul Trattato TPNW di proibizione delle armi nucleari: Italia, ripensaci". 7 Juli 2020, <https://www.disarmo.org/ican/>
- Rete Italiana Pace E Disarmo. "30 anni della Legge 185/90 sull'export militare: dati ed analisi di tre decenni di vendita di armi italiane". 9 Juli 2020, <https://www.disarmo.org/rete/docs/5346.pdf>
- Rete Italiana Pace E Disarmo. "Italian arms: in 2021 a historical record of actual exports worth almost 4.8 billion". 27 Mei 2022, Italian arms: in 2021 a historical record of actual exports worth almost 4.8 billion/
- Rt News. "Italy will not buy F-35s anymore, mulls walking out of existing contracts -Defense Minister". 7 Juli 2018, <https://www.rtl.com/news/432071-italy-f35-jets-not-anymore/>
- Rucht, Dieter. "Arms, Human Rights and Geopolitical Interest: Reflections on Italian Defence Exports". Istituto Affari Internazionali, (2021): 1-8.
- Sipri. *Rapporto del Presidente Consiglio dei Ministri Short Version*. Italia, 2010. https://www.sipri.org/sites/default/files/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/italy/Italy_2010_short-version.pdf
- Sipri. *Relazione Sulle Operazioni Autorizzate E Solote Per Il Controllo Dell Esportazione, Importazione E Transito Dei Materiali di Armamento*. Italia, 2019. https://www.sipri.org/sites/default/files/202007/italy_volume_i_2019_0.pdf

- The Associated Press, "The Latest: Mnuchin meets with embattled Saudi crown prince" 23 Oktober 2018, <https://www.yahoo.com/news/latest-germany-presses-eu-unity-saudi-arabia-065046064.html>
- Trading Economics "Italy Weapons Sales" 23 Oktober 2021, <https://tradingeconomics.com/italy/weapons-sales#:~:text=Weapons%20Sales%20in%20Italy%20averaged,1%20USD%20Million%20in%201953.>
- Ullah, Areeb. "Italy blocks arms exports to Saudi Arabia and UAE." Middle East Eye, 29 Januari 2020, <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-uae-italy-blocks-arms-exports>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. "Universal Declaration of Human Rights" 20 Juli 1998, <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>
- Yusran, Afri Asnelly. et al. "Mengkaji Neoliberal Institusionalisme Uni Eropa dalam Problematika Implementasi Kebijakan Migrasi Pada Traktat Lisbon." Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 8, no. 6 (2016): 1-16.